

ANALISIS KINERJA ANGGARAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERODE 2017-2021

Alwin Fedianto Tameon

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
alwintameon93@gmail.com

Sarinah Joyce Rafael

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
joyce.rafael@staf.undana.ac.id

Linda Lomi Ga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
linda.ga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kinerja anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama lima tahun anggaran (2017-2021) dengan konsep pengukuran *value for money* yang terdiri dari tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik penilaian pustaka. Data yang diolah dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2017-2021 untuk rasio ekonomi berada pada kategori cukup ekonomis, dan rasio efisiensi berada pada kategori efisien, sedangkan untuk rasio efektifitas berada pada kategori efektif. Hasil analisis ini menerangkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik dalam mengelola keuangannya.

Kata kunci : *Kinerja Anggaran, Value for Money, Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas.*

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the performance of the budget for the Regional Government of East Nusa Tenggara Province for five fiscal years (2017-2021) with the concept of measuring value for money which consists of three main elements, namely economy, efficiency and effectiveness. The type of research used in this study is to use a qualitative descriptive method. Data collection techniques used in this research are documentation techniques and literature assessment techniques. The data processed in this study is a report on the budget realization of the periode year from 2017-2021 for the Province of East Nusa Tenggara. The data analysis technique used in this study are using economic ratios, efficiency ratios, and effectiveness ratios. The results of this study indicate that the financial performance of the Government of East Nusa Tenggara Province for the 2017-2021 for economic ratios is in the quite economical category, and efficiency ratios are in the efficient category, while for effectiveness ratios are in the effective category. The results of this analysis explain that the Regional Government of East Nusa Tenggara Province is good at managing its finances

Keywords : *Budget Performance, Value for Money, Economy, Efficiency, Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Dalam kinerja keuangan daerah yang dilihat adalah dampak dari kinerja keuangan itu sendiri terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga kategori yang merupakan target pencapaian kesejahteraan masyarakat yakni tentang sejauh mana persoalan sosial yang dapat diatasi, sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, dan sejauh mana kesempatan untuk memperoleh peningkatan taraf hidup (Midgley, 2005). Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, Program Pembangunan PBB melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia.

Kinerja (*performance*), menurut kamus akuntansi manajemen kontemporer, dikatakan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Tunggal, 1995:126). Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah

dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan otonomi daerahnya dengan tujuan menjamin pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas merupakan tiga elemen utama dalam konsep *Value for money* yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Model *value for money* atau yang dikenal dengan model 3E mengukur kinerja organisasi sektor publik dengan analisis membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan input dan output aktualnya. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana (Mardiasmo, 2015:27). *Value for money* dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik. Mengingat pentingnya pengukuran kinerja seperti yang telah diuraikan maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Anggaran Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021"

KAJIAN TEORI

Agency Theory

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *agency theory*. Supriyono (2018) mengemukakan bahwa *Agency Theory* muncul karena keberadaan hubungan antara

agen dan prinsipal, agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen.

Kinerja

Kinerja adalah tabelan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006:274).

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Mashun, 2013:25).

Manfaat Kinerja Sektor Publik

Mashun (2013:23) menjelaskan organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian.

Value For Money

Value for money menurut Mardiasmo (2015:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas yaitu

tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Indikator Value for Money

Peranan indikator kinerja pada *value for money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan. Indikator *value for money* menurut Mardiasmo (2015:130) yaitu:

- a. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)

Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik. Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

- b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Menurut Mahmudi (2015:89), Indikator Kinerja merupakan konsep yang multi idensial dan kompleks. Indikator kinerja bukan hanya kinerja keuangan saja, tetapi juga indikator nonkeuangan. Indikator keuangan hanya menekankan pada indikator yang berorientasi pada input dan output yang terbatas pada anggaran dan realisasinya. Sementara indikator nonkeuangan, seperti kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, *outcome* pelayanan belum banyak diakomodasi

Manfaat Implementasi Value for Money

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *value formoney* pada organisasi sektor publik yaitu ekonomi (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2015:130)

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

dari informan yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021 yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul serta melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh agar dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan objektif terkait kinerja anggaran pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2017-2021. Sesuai dengan pendekatan *value for money* yang memiliki 3 tingkatan yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengukuran Ekonomi

Mengukur dan mengetahui Tingkat ekonomi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan anggaran anggaran belanja. Rumus yang digunakan menurut Mahsun (2013:186) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria ekonomis adalah :

Tabel 1
Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi

Presentase (%)	Kriteria
>100	Ekonomis
85-100	Cukup Ekonomis
65-84	Kurang Ekonomis
<65	Tidak Ekonomis

Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017–2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Rasio Ekonomi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021

Sumber: Data Peneliti (2022), diolah

Pada tabel 2 rasio ekonomi tahun 2017 yaitu 92,65%. Kemudian, pada tahun 2018 rasio ekonomi naik menjadi 93,93% dan masih berada dalam kriteria cukup ekonomis. Hingga

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Ekonomi (%)	Kriteria
2017	4.175.809.475.825,00	4.507.020.679.434,00	92,65	Cukup Ekonomis
2018	4.415.586.584.477,67	4.701.140.309.467,00	93,93	Cukup Ekonomis
2019	4.758.379.563.095,30	5.222.406.123.824,55	91,11	Cukup Ekonomis
2020	5.290.121.484.382,14	5.821.414.084.033,00	90,87	Cukup Ekonomis
2021	5.508.767.906.132,69	6.880.672.335.906,00	80,06	Kurang Ekonomis
Rata-Rata			89,00	Cukup Ekonomis

pada tahun 2019 menurun ke angka 91,11% dan pada tahun 2020 kembali menurun 0,24% menjadi 90,87%. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2019 hingga 2020, rasio ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada pada diatas 85% sehingga masih tergolong cukup ekonomis. Namun, pada tahun 2021 rasio ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur turun menjadi 80,06% dan tergolong dalam kriteria kurang ekonomis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diketahui adapun faktor yang menyebabkan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada kategori cukup ekonomis atau realisasi belanjanya lebih kecil dari anggaran belanja yang telah ditargetkan antara lain yaitu adanya pekerjaan atau program yang belum selesai dikerjakan pada tahun anggaran berjalan sehingga belum bisa dibayar, ketersediaan dana yang tidak cukup karena realisasi pendapatan yang menurun, serta perubahan regulasi dalam keadaan luar biasa misalnya bencana alam atau pandemi COVID-19 yang membuat belanja yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Pengukuran Efisiensi

Mengukur dan mengetahui tingkat efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Rumus yang digunakan

menurut (Mahsun, 2013:186) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi adalah :

Tabel 3
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<90	Sangat Efisien
90-99	Efisien
100	Cukup Efisien
>100	Tidak Efisien

Sumber:(Mahmudi, 2015:111)

Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017–2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Rasio Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2017	4.175.809.475.825,00	4.700.213.492.509,51	88,84	Sangat Efisien
2018	4.415.586.584.477,67	4.781.089.962.593,22	92,36	Efisien
2019	4.758.379.563.095,30	5.354.092.405.679,30	88,87	Sangat Efisien
2020	5.290.121.484.382,14	5.419.936.156.637,49	97,60	Efisien
2021	5.508.767.906.132,69	5.312.446.872.608,51	103,70	Tidak Efisien
Rata-Rata			94,45	Efisien

Sumber: Data Peneliti (2022), diolah

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat presentasi yang dihasilkan maka akan dianggap efisien. Rasio efisien tahun 2017 Rasio efisiensi untuk tahun 2017 berada pada angka 88,84% sehingga tergolong dalam kriteria sangat efisien, dan pada tahun 2018 rasio efisiensi mengalami kenaikan sebesar 3,52% yaitu mencapai angka 92,36% sehingga pada tahun 2018 rasio efisiensi tergolong dalam kriteria efisien. Pada tahun 2019 rasio efisiensi mengalami penurunan ke angka 88,87% sehingga tergolong kriteria efisien, akan tetapi rasio efisiensi di tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami kenaikan yaitu mencapai angka 97,60% dan 103,70% yang menyebabkan rasio efisiensi tahun 2020 berada pada kategori efisien dan tahun 2021 berada pada kategori tidak efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui faktor yang menyebabkan tingkat efisiensi berada pada kategori efisien yaitu karena optimalnya pengelolaan sumber daya pada sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disertai peningkatan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Pengukuran Efektivitas

Mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diukur dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Rumus yang digunakan menurut Mahsun (2013:187) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas adalah :

Table 5
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
≥ 100	Sangat Efektif
85-99	Efektif
65-84	Kurang Efektif
<65	Tidak Efektif

Sumber:(Mahmudi, 2015:111)

Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017–2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Rasio Tingkat Efektivitas Kinerja
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Periode 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2017	4.700.213.492.509,51	4.797.226.620.000,00	97,98	Efektif
2018	4.781.089.962.593,22	4.910.289.134.602,00	97,37	Efektif
2019	5.354.092.405.679,30	5.561.056.352.548,00	96,28	Efektif
2020	5.419.936.156.637,49	5.837.951.035.533,00	92,84	Efektif
2021	5.312.446.872.608,51	5.881.616.887.272,00	90,32	Efektif
Rata-Rata			94,74	Efektif

Pada tabel 6, Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 hingga 2021 tetap terjaga diatas 90%, walaupun mengalami tren penurunan. Rasio efektivitas terbesar berada pada tahun 2017 dengan tingkat efektivitas 97,98%. Sedangkan, tingkat rasio efektivitas terendah berada pada tahun 2021 dengan tingkat efektivitas sebesar 90,32%. Rasio efektivitas tahun 2020 merupakan rasio efektivitas yang mengalami penurunan paling signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui adanya faktor yang mempengaruhi sehingga tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada kriteria efektif yaitu karena optimalnya pengelolaan sumber daya pada sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa Pemerintah Nusa Tenggara Timur akan terus bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan realisasi pendapatannya lewat koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang matang agar tahun berikutnya tidak mengalami penurunan presentase realisasi pendapatan terhadap target pendapatan

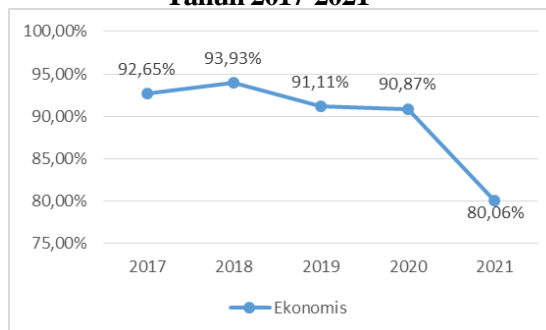
PEMBAHASAN

Rasio Ekonomi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021

Tingkat ekonomis kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja dari tahun 2017 sampai 2021. Hal penting yang perlu diketahui bahwa ekonomis merupakan penghematan anggaran untuk memperoleh input dengan tidak

melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Berikut disajikan grafik rasio ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1.2.

Gambar 1
Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017-2021



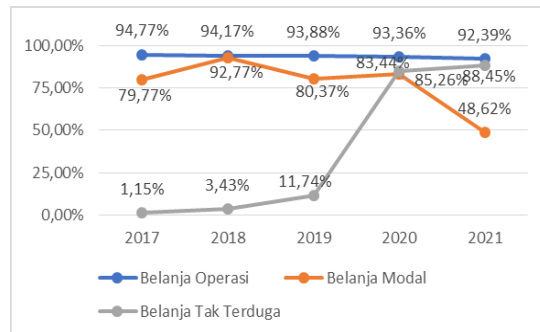
Sumber : Data peneliti (2023), diolah

Gambar 1 menunjukkan rasio ekonomi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2020 berada pada persentase diatas 90% dan tergolong cukup ekonomis. Pada tahun 2017, rasio ekonomi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 92,33% yang tergolong cukup ekonomis. Pada tahun 2018 rasio ekonomi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sebesar 1,28% menjadi 93,93% dan termasuk kategori cukup ekonomis. Tahun 2019 terjadi penurunan rasio ekonomi menjadi 91,11%. Walaupun terjadi penurunan, nilai tersebut masih mempertahankan pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori cukup ekonomis berkaitan dengan pengelolaan anggaran belanja.

Pada tahun 2020, rasio ekonomi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mengalami penurunan sebesar 0,24% menjadi 90,87%. Hal ini berarti pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 masih dapat menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis. Tahun 2021 kembali terjadi penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 10,81% menjadi 80,06%. Penurunan tersebut membawa kinerja pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 menjadi tergolong kurang ekonomis berkaitan pengelolaan belanja daerah. Pemerintah Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Laporan Realisasi Anggarannya

mengelompokkan belanja kedalam tiga jenis yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Tingkat ekonomis berdasarkan masing-masing jenis belanja telah disajikan gambar 2 berikut ini.

Gambar 2
Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Belanja



Berdasarkan Gambar 2, Belanja Operasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 cenderung berada pada tren penurunan meskipun nilai penurunannya masih tergolong kecil dan berada pada kategori cukup ekonomis. Belanja operasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk dalam belanja operasi adalah belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja tersebut merupakan belanja yang penting serta harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, rasio ekonomi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cenderung mengalami penurunan yang tidak signifikan mengingat pentingnya belanja operasi dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah. Kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah salah satunya yakni kurangnya pemahaman regulasi terkait pengadaan barang dan jasa yang terus mengalami perubahan sehingga realisasi belanja barang dan jasa juga mengalami penurunan.

Hal yang berbeda terjadi pada Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, rasio ekonomi belanja modal berada pada nilai 79,77% dan tergolong kurang ekonomis. Selanjutnya, pada tahun 2018, rasio ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan yang

drastis hingga mencapai 92,77% dan termasuk cukup ekonomis. Kenaikan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2019 kembali terjadi penurunan sebesar 12,4% menjadi 80,37%. Tahun 2020, rasio ekonomi naik ke angka 83,44% dan tahun 2021 kembali menurun menjadi 48,62% menyebabkan tidak ekonomisnya belanja modal pada tahun 2021 tersebut. Kendala dan permasalahan terkait belanja modal juga masih berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019, kurangnya personel yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah.

Rasio ekonomi belanja tak terduga Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 hingga 2019, belanja tak terduga Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki rasio ekonomi yang sangat rendah yakni 1,15% pada tahun 2017, 3,43% pada tahun 2018 dan 11,74% pada tahun 2019 dan termasuk kedalam kategori tidak ekonomis. Hal tersebut disebabkan oleh kecilnya realisasi belanja tak terduga dibandingkan dengan yang telah dianggarkan. Tahun 2020 realisasi belanja tak terduga meningkat hingga mencapai 85,26% dan berada pada kriteria cukup ekonomis. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga tersebut. Kondisi pandemi COVID-19 yang berlanjut hingga tahun 2021, mengakibatkan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih harus menggunakan anggaran belanja tak terduga tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2021 rasio ekonomi belanja tak terduga meningkat menjadi 88,45% dan termasuk dalam kategori cukup ekonomis.

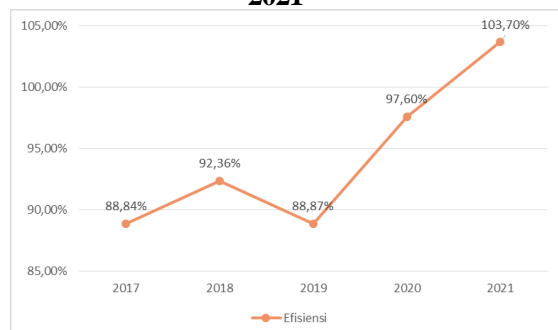
Rasio ekonomis untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 secara rata-rata menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada kriteria cukup ekonomis. Mahsun (2013:186) menjelaskan bahwa suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis apabila dapat mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu. Mahmudi (2015:110) juga menjelaskan bahwa belanja akan dinilai baik apabila realisasinya tidak melebihi target anggarannya karena anggaran belanja merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan.

Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan konsep ekonomis dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan atau melakukan penghematan anggaran belanja. Hubungan antara hasil penelitian ini dengan *agency theory* yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku agen diberikan wewenang untuk mengatur keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya sebagai prinsipal dan dari hasil penelitian saat ini diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penghematan terhadap anggaran belanja agar sisa lebih penggunaan anggaran dapat digunakan sebagai pembiayaan ditahun selanjutnya.

Rasio Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021

Tingkat efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan dari tahun 2017 sampai 2021. Hasil perhitungan pada tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi atau naik turun dan secara rerataan berada pada kriteria efisien dengan realisasi belanja lebih kecil dari realisasi pendapatan. Berikut disajikan grafik rasio efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021.

Gambar 3
Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021



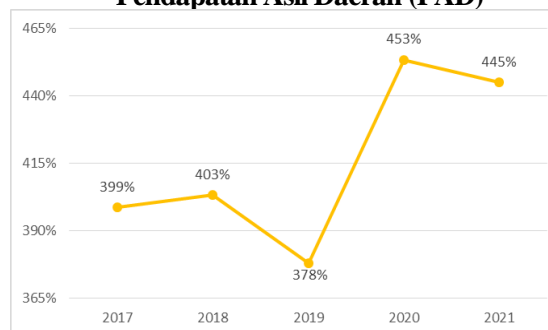
Sumber : Data peneliti (2022), diolah

Berdasarkan gambar 3, tahun 2017 rasio efisiensi pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 88,84% dan berada dalam kategori sangat efisien. Pada tahun 2018, rasio efisiensi tersebut meningkat ke

angka 92,36% dan masih tergolong efisien. Pada tahun 2019 rasio efisiensi pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali ke angka dibawah 90% yakni 88,87% dan termasuk kedalam kategori sangat efisien. Pada tahun 2020 rasio efisiensi tersebut kembali meningkat menjadi 97,60% yang artinya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tahun 2021, rasio efisiensi pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus meningkat hingga mencapai 103,70% dan termasuk kedalam kategori tidak efisien.

Rasio efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021, secara rata-rata, berada pada kriteria efisien. Mardiasmo (2018:165) menjelaskan bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mampu mengefisienkan pendapatan dan belanja daerah yang dibuktikan dengan realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanjanya. Untuk mengetahui rasio efisiensi belanja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pendapatan Asli Daerahnya, telah disajikan gambar 4 berikut

Gambar 4
Rasio Efisiensi Belanja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber : Data peneliti (2022), diolah

Berdasarkan gambar 4, rasio efisiensi belanja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Total Realisasi Belanjanya sehingga termasuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini menunjukkan besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah provinsi

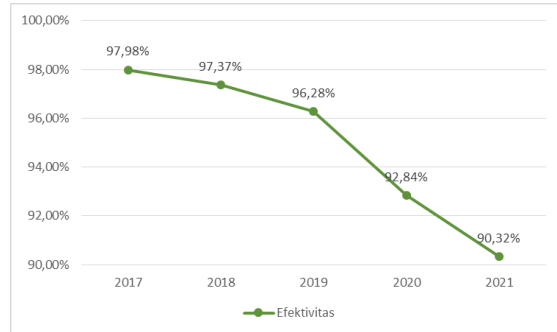
Nusa Tenggara Timur terhadap Pendapatan Transfer dari pusat. Rasio efisiensi terhadap PAD yang menunjukkan Tidak Efisien tersebut juga sebagai akibat dari belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah dan menyebabkan realisasi PAD menjadi sangat kecil jika dibandingkan belanja daerah. Padahal sebenarnya potensi itu ada dan cukup besar, hanya saja belum tergali, akibatnya dana untuk pembiayaan pembangunan menjadi lebih kecil dan harus bergantung dengan pendapatan transfer dari pusat. Ketergantungan ini juga mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang juga masih sangat rendah.

Hubungan antara hasil penelitian ini dengan *agency theory* yaitu dalam hak otonomi daerah, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai agen telah mampu membiayai belanja daerahnya untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat sebagai prinsipalnya, dengan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, walaupun rasio efisiensi terhadap PADnya masih tergolong rendah

Tingkat Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021

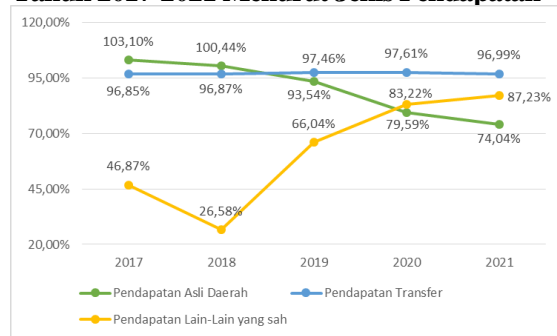
Tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan yang telah ditargetkan dari tahun 2017 sampai 2021. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1.6, tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi tidak begitu drastis. Walaupun terjadi penurunan, tetapi rasio efektivitas Pemerintah Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berada pada kriteria efektif karena persentasenya masih berada pada kisaran 90% sampai 100%. Berikut disajikan grafik rasio efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 hingga 2021.

Gambar 5
Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021



Berdasarkan Gambar 1.5, rasio efektivitas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 adalah 97,98% dan masih tergolong dalam kategori efektif. Pada tahun 2018 rasio efektivitas tersebut mengalami penurunan menjadi 94,62% tetapi masih berada dalam kategori efektif. Penurunan rasio efektivitas terus terjadi hingga pada tahun 2019 mencapai angka 96,22% dan pada tahun 2020 menjadi 92,84%. Pada tahun 2021 rasio efektivitas tersebut mengalami penurunan lagi menjadi 90,32%. Rasio efektivitas tersebut masih berada pada kriteria efektif, walaupun terus mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah belum optimalnya pemanfaatan aset daerah pada beberapa SKPD yang dapat menimbulkan potensi penerimaan daerah. Menurut jenis pendapatannya, rasio efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disajikan pada grafik berikut ini.

Gambar 6
Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Pendapatan



Berdasarkan Gambar 6, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun

2017 sampai 2021 cenderung berada pada tren penurunan. Pada tahun 2017 dan 2018, rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur secara berturut-turut yakni 103,10% dan 100,44% dan berada pada kategori Sangat Efektif. Tahun 2019, rasio efektivitas tersebut menurun sebesar 6,9% ke angka 93,54%. Rasio efektivitas tersebut masih tergolong ke dalam kriteria efektif, walaupun terjadi penurunan. Tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi penurunan menjadi 79,59% dan 74,04% serta berada dalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan yang cukup drastis pada rasio efektivitas PAD sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan khususnya dalam sektor pariwisata. Penurunan PAD yang terjadi terus menerus menyebabkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan sumber pendapatan lainnya agar tercapai tingkat efektivitas yang ditargetkan.

Berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer pada pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 hingga 2021 cenderung stabil dengan kenaikan dan penurunan yang bahkan tidak lebih dari 2%. Secara rata-rata, rasio efektivitas pendapatan transfer tersebut masih berada di atas 90% dan termasuk kategori efektif. Rasio efektivitas terus terjaga karena peran dari pendapatan lain-lain yang sah yang terus meningkat pada saat pendapatan transfer cenderung konstan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung menurun. Pendapatan Daerah lain-lain yang sah tahun 2017 hingga 2021 berada pada tren meningkat dan mencapai persentasenya tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai 87,23% dan termasuk kriteria Efektif.

Tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 sampai 2021 secara rata-rata berada pada nilai 94,74% dan berada pada kriteria efektif. Mardiasmo (2018:166) menjelaskan bahwa pada dasarnya efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dikategorikan efektif dalam merealisasikan pendapatan daerahnya karena hampir mendekati target pendapatan yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan anggaran dengan metode *Value For Money* yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran berdasarkan rasio ekonomi tergolong dalam kriteria cukup ekonomis karena dari hasil analisis perhitungan rata-rata rasio ekonomi selama tahun 5 tahun yaitu mencapai 89,00%, Rasio efisiensi tergolong dalam kriteria efisien dalam pengelolaan anggaran, dimana hasil analisis rata-rata perhitungan rasio efisiensi mencapai angka yaitu 94,45%, Pengelolaan anggaran pada APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rasio efektivitas tergolong dalam kriteria efektif, dimana hasil analisis rata-rata perhitungan rasio efektif mencapai angka yaitu 94,74%.

Saran

1. Saran bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menerapkan konsep *Value For Money* sebagai salah satu metode untuk menganalisis atau menilai kinerja, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan kinerja dari sisi ekonomis dengan cara mengurangi biaya yang dikeluarkan atau melakukan penghematan anggaran belanja agar realisasinya tidak melebihi target anggarannya, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan agar tetap mempertahankan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerjanya ditahun selanjutnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk menambahkan indikator lain terkait pengukuran kinerja dengan konsep *value for money* seperti *input*, *outcome*, dan *impact*. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengukur kinerja anggaran menggunakan rasio keuangan daerah sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Dessler, G. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resources* (2nd ed.). Prenhalindo.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta
- Khalimatus Syadiah, Susanti, W., & Rasyidi, A. (2016). Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya*, 9–20.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mashun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (4th ed.). BPFE.
- Midgley, J. (2005). *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Direktorat Perguruan Tinggi.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. (2007). *Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan* (5th ed.). Salemba Empat.
- Nainu, R., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2017). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam “Program Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama” Dengan Menggunakan Metode Value for Money Pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1158–1166. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18619>. 2017
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*. Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI.
- Purwiyanti, D. (2017). ANALISIS KINERJA BERBASIS KONSEP VALUE FOR MONEY PADA KEGIATAN FISIK PEKERJAAN IRIGASI DONGGALA KODI (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *E Jurnal Katalogis*, 5(3), 190–200.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tunggal, A. W. (1995). *Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer* (1st ed.). Rineka Cipta.
- Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja* (3rd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode Value for Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 354–361. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26288>. 2019